

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Pelaksanaan pengembangan merupakan salah satu fungsi manajemen yang harus dilaksanakan oleh suatu lembaga/organisasi karena terkait dengan hasil yang hendak dicapai. Diklat fungsional dilihat dari dimensi isi pelatihan, metode pelatihan, sikap dan keterampilan, lama waktu pelatihan dan fasilitas pelatihan sudah berjalan sudah sesuai dengan kebutuhan, namun untuk lamanya waktu pelaksanaan diklat dinilai masih kurang ditambah lagi sering dilaksanakan pemadatan materi/jadwal menjelang akhir kegiatan dan diklat ini tidak dilaksanakan secara berkelanjutan dan berkesinambungan.

Hasil penelitian dari penulis menunjukkan diklat fungsional sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas pegawai sebagai pejabat pengadaan dan bendahara. Pembagian dan penempatan pegawai yang tidak sesuai dengan kompetensinya menyebabkan kerugian atau permasalahan terkait laporan pertanggungjawaban keuangan negara oleh bendahara pengeluaran Pilkada tahun 2020. Fungsi pengarahan dan pengawasan belum terealisasi sesuai aturan sehingga menyebabkan terjadinya kesalahan dalam pencatatan laporan keuangan yang

menyebabkan pengembalian dana ke kas negara oleh bendahara Pilkada KPU Kab. Pasaman tahun 2020.

Pelaksanaan rapat staf sangat penting untuk membahas rencana kerja, kendala dan permasalahan yang dihadapi oleh pegawai dalam menjalankan



tugasnya sebagai pejabat pengadaan dan bendahara pengeluaran belum berjalan sesuai dengan harapan. Karena rapat staf ini diharapkan menjadi solusi pemecahan masalah sehingga dengan mudah dapat menentukan langkah-langkah selanjutnya. Namun hal ini belum berjalan sebagaimana mestinya. Dimana pegawai melaksanakan tugas, apabila menemui kendala baru melaporkannya secara langsung kepada kasubag di atasnya.

6.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil analisis penulis terkait pelaksanaan pelaksanaan diklat fungsional pada pegawai KPU Kab Pasaman, maka dapat penulis rumuskan beberapa saran terkait diklat ini bahwa dilaksanakannya adanya pemetaan pegawai dan penempatan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki, pembagian kerja yang jelas sesuai dengan uraian tugas masing-masing, pengawasan secara terarah serta evaluasi kinerja dari pimpinan secara berkala dan pelaksanaan diklat fungsional secara berkesinambungan dan adanya pembagian antara diklat untuk pemantapan pelaksanaan tugas dengan pegawai yang baru mengikuti diklat fungsional.

Adapun saran untuk penelitian selanjutnya perlunya kajian terhadap pelaksanaan diklat jabatan bagi pejabat fungsional KPU.